



**RANCANGAN PERUBAHAN**  
**RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN**  
**TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN**  
**2018**

**KUALA TUNGKAL,**

**2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal,

2018

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**H. R. GATOT SUWARSO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB. I. PENDAHULUAN ..... 1

1.1.	Latar	1
1.2.	Landasan	1
1.3.	Maksud dan	2
1.4.	Sistimatika	3
BAB. II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	
	TAHUN LALU.....	5
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD	
	Tahun lalu.....	5
2.2.	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan	
	Kegiatan Tahun 2017.....	6
2.3.	Analisa Kinerja.....	9
2.4.	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi.....	11
2.5.	Pemecahan Masalah.....	11
BAB. III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	13
3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2017.....	13
3.2.	Program dan Rencana Kerja Tahun 2017.....	17
BAB. IV.	PENUTUP.....	19

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

----- o O o -----

# A

# PENDAHULUAN

---

## 1. LATAR BELAKANG

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pertauran Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil Evaluasi hasil kerja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan, hal ini memenuhi maksud Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pertauran Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
- (2) bertujuan untuk menjamin kesesuaian anantara program, kegiatan lokasi kegiatan,

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju program prioritas Rancangan Awal RKPD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik dan pemerintahan yang bersih.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pertauran Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **3.1. MAKSUD**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 dan menggambarkan capaian kinerja yang didapat ditranspormasikan kedalam Renja Perangkat Daerah.

#### **3.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah:

- 3.2.1 Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahun lalu berdasarkan APBD;
- 3.2.2 Sebagai standar bagi baku penjabaran Tupoksi Inspektorat sehingga dapat dipahami semua yang berkepentingan.
- 3.2.3 Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
- 3.2.4 Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi Manajemen untuk mewujudkan optimalisasi tugas Inspektorat.

### **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

RENJA Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

# B

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

---

### 1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator - indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2017) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar</b>											
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	18262	3,156,881,000	808	9,200,000	2909	3,900,000	3,654	4,648,800	2804	0.15%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air	72	498,600,000			3	132,899,990	15	128,726,492	20.83%	25.82%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah dasar pembyaran honor pengadministrasi keuangan	60	456,650,000			9	78,950,000	20	143,234,000	33.33%	31.37%	Inspektorat
			Jumlah pengadministrasi keuangan	96		15	31	32.29%						
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	6	36,000,000			1	6,000,000	2	7,500,000	33.33%	20.83%	Inspektorat

			Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor	72	43.212.480	12	4.515.000	12	4.515.000	15	5.722.122	20.83%	13.24%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72	351.248.500	12	50.209.700	12	50.209.700	15	62.872.522	20.83%	17.90%	Inspektorat
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	175.350.000	12	22.230.000	12	22.230.000	15	26.215.000	20.83%	14.95%	Inspektorat
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	72	40.981.500	12	4.876.300	12	4.876.300	15	6.114.680	20.83%	14.92%	Inspektorat
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	72	61.400.000	12	9.600.000	12	9.600.000	15	10.820.000	20.83%	17.62%	Inspektorat
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	72	26.500.000	12	4.200.000	12	4.200.000	15	5.250.000	20.83%	19.81%	Inspektorat
		Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	318	1.347.938.520	80	199.627.704	80	679.885.000	116	362.734.497	36.48%	26.91%	Inspektorat

<b>1</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor</b>															
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang telah dilaksanakan	87	783,100,000	11	64,500,000	-	0	-	0	-	11	64,500,000	12.64%	8.24%		Inspektorat
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	72	90,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	3	602,000	3	15	10,602,000	20.83%	11.78%		Inspektorat
			Jumlah Petugas Penjaga Kantor	6	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	1,500,000	1	2	7,500,000	33.33%	125.00%		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya kendaraan dinas operasional	21	1,218,000,000	2	190,400,000	3	190,400,000	3	25,796,050	3	5	216,196,050	35.48%	17.75%		Inspektorat
				124		24		20		20		20	44					
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan	90	77,000,000	15	10,500,000	15	10,500,000	3	4,650,000	3	18	15,150,000	20.00%	19.68%		Inspektorat
				90		15		15		3		3	18					
<b>1</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>															
	Meningkatnya disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhiya pakaian Dinas harian (PDH)	261	124,900,000	41	15,375,000	41	17,250,000	41	15,375,000	41	82	30,750,000	31.42%	24.62%		Inspektorat

## 1.2. ANALISIS KINERJA PALAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sesuai dengan dokmen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang telah disusun maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Indikator dan Target 5 (lima) Tahun Renstra  
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	Persentase	100%
			Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	Persentase	90%
			Tingkat maturitas SPIP	Level	2
2	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2017 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan tahun lalu/ sebelumnya dan beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut ini :

## Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	2016			2015			Capaian Kinerja Naik/Turun		
				T	R	%	T	R	%			
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pemeriksaan Kasus Pengaduan	242	12	50	30	10	33			
			Reguler/ sertijab	190	174	92	193	204	106			
			Sidak	-	-	-	-	-	-			
			Dana BOS	13	5	38	13	13	100			
			Review Laporan Keuangan	1	1	100	1	1	100			
			LAKIP	26	26	100	26	26	100			
			Monitoring Bansos	-	-	-	-	-	-			
			Monitoring Penutupan Kas	57	57	100	57	57	100			
			Pre-audit/monitoring khusus	-	-	-	-	-	-			
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP :									
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	797	419	53	843	559	66			
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	13	13	100	50	35	70			
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	98	49	50	79	50	63			
Jumlah				2127	1237	58	2264	1599	71			

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
  - Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- b. Faktor Penghambat :
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa & Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
  - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
  - Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
  - Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
  - Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

### **1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Tanjung Jabung Barat tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2016 = CC), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tetrsebut atau meningkatkannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lamban walaupun di tahun 2016 menunjukkan progres yang mengembirakan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
5. Maturitas Kapabilitas APIP di awal Tahun 2018 harus sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai quality assurance bagi Bupati Tanjung Jabung Barat.

### **1.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

---

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 8

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (Output)	Jumlah Anggaran (Dana)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar</b>	100	<b>3.504.923.486,-</b>
01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	100%	3.900.000,-
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air	100%	132.899.990,-
03	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor dapat dilaksanakan	100%	78.950.000,-
04	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor	100%	10.522.496,-
05	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	50.209.700,-
06	Kegiatan Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	22.230.000,-
07	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	100	4.876.300,-
08	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	100%	9.600.000,-
09	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	100%	4.200.000,-
10	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Efektifitas koordinasi pengawasan	100%	187.535.000,-
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>216.900.000,-</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan	100%	-
02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	16.000.000,-
03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	100%	190.400.000,-
04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan	100%	10.500.000,-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>46 stel</b>	<b>15.375.000,-</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian Dinas harian (PDH)	46 stel	15.375.000,-
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan</b>	<b>Meningkatnya ketaatan,</b>	<b>100%</b>	<b>2.357.385.000,-</b>

	<b>Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>		
01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	100%	1.374.450.000,-
02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan tindaklanjutnya	100%	295.375.000,-
03	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	100%	331.695.000,-
04	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakerwasda serta tersusunnya PKPT	100%	60.910.000,-
05	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Penurunan jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	100%	181.365.000,-
06	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya penyelesaian TP TGR	100%	113.590.000,-
<b>1</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>100%</b>	<b>474.800.500,-</b>
01	Reviu/Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Tersusunnya laporan keuangan Pemkab sesuai SAP	100%	83.050.500,-
02	Saber Pungli	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	100%	191.750.000,-
03	Tindakan Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Pencegahan TP4D	100%	100.000.000,-
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK / Sertifikat JFA / P2UPD</b>	<b>34 org</b>	<b>159.950.000,-</b>
01	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa	34 org	159.950.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.629.333.986,-</b>

### 1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

# C

## TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

---

### 1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan merupakan target Kualitatif Organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Pernyataan tujuan

merupakan penjabaran misi yang bersifat kebiih nayata.

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran akan memulaikan focus dan penyusunan kegiatan, melalui rumusan sasaran Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Tabel

Sasaran Indikator dan Target Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	Persentase	100%
			Persentase Perangkat Daerah (Eselon II ) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	Persentase	90%
			Tingkat maturitas SPIP	Level	2
2	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

# D

## Rencana Kerja Dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### 1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2018 sebagai acuan bagi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2018 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang

berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

## 2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renja tahun 2018, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel Pendanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### Indikasi Pendanaan Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (Output)	Jumlah Anggaran (Dana)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancer</b>	100	<b>3.504.923.486,-</b>
01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	100%	3.900.000,-
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air	100%	132.899.990,-
03	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor dapat dilaksanakan	100%	78.950.000,-
04	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor	100%	10.522.496,-
05	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	50.209.700,-
06	Kegiatan Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	22.230.000,-
07	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	100	4.876.300,-
08	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi	100%	9.600.000,-

	Perundang - Undangan	pengawasan		
09	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	100%	4.200.000,-
10	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Efektifitas koordinasi pengawasan	100%	187.535.000,-
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>216.900.000,-</b>
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan	-	-
02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	16.000.000,-
03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	100%	190.400.000,-
04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan	100%	10.500.000,-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>46 stel</b>	<b>15.375.000,-</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian Dinas harian (PDH)	46 stel	15.375.000,-
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.357.385.000,-</b>
01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	100%	1.374.450.000,-
02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan tindaklanjutnya	100%	295.375.000,-

03	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	100%	331.695.000,-
04	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakerwasda serta tersusunya PKPT	100%	60.910.000,-
05	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Penurunan jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	100%	181.365.000,-
06	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya penyelesaian TP TGR	100%	113.590.000,-
<b>1</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>100%</b>	<b>474.800.500,-</b>

	<b>Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>			
01	Reviu/Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Tersusunnya laporan keuangan Pemkab sesuai SAP	100%	83.050.500,-
02	Saber Pungli	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	100%	191.750.000,-
03	Tindakan Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Pencegahan TP4D	100%	100.000.000,-
1	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK / Sertifikat JFA / P2UPD</b>	<b>34 org</b>	<b>159.950.000,-</b>
01	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa	34 org	159.950.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.629.333.986,-</b>

# E

# PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan

berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), Renja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat lebih akuntable dan transparans kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2018

